

Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Pemukiman Kumuh di Aliran Sungai Deli Medan

Salwa Rizky Adinda^{1*}, Lisna Sahara², Rizky Akbar³, Hairani Siregar⁴

¹²³⁴ Universitas Sumatera Utara

Abstrak: Efektivitas merupakan salah satu indikator ataupun alat dalam mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program yang telah dirancang oleh instansi maupun organisasi sebagai alternatif solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi di lapangan, sehingga program yang diselenggarakan menjadi tepat guna dan bermanfaat bagi sasaran program. Hadirnya Program Bantuan Sosial Tunai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu perekonomian masyarakat terlebih masyarakat rentan, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman kumuh. Masyarakat pemukiman kumuh adalah masyarakat yang tinggal di wilayah yang tidak layak huni seperti di sepanjang aliran sungai atau rel kereta api dengan komponen bangunan rumah yang tidak sesuai standar rumah sehat dikarenakan penghasilan rendah yang tak mampu membeli lahan serta mencukupi komponen rumah layak huni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh lima narasumber, yakni masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai. Penelitian ini juga memberikan lima pertanyaan terhadap lima masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai di wilayah pemukiman kumuh aliran Sungai Deli Medan terkait efektivitas penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai. Lewat pertanyaan yang telah dipaparkan dan ditanyakan kepada pihak sasaran, hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai pada masyarakat pemukiman kumuh di aliran Sungai Deli Medan belum berjalan optimal dan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, hingga pengurusan administrasi yang sulit terkait data DTKS.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Masyarakat Pemukiman Kumuh

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.218>

*Correspondence: Salwa Rizky Adinda

Email: salwadinda0809@gmail.com

Received: 21-01-2025

Accepted: 22-02-2025

Published: 23-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Effectiveness is one of the indicators or tools in measuring the success rate of a program that has been designed by agencies and organizations as an alternative solution in solving problems that occur in the field, so that the program that is held becomes appropriate and beneficial for the target program. The presence of the direct cash transfer program aims to improve the welfare of the community and help the economy of the community, especially vulnerable communities, including people living in slum areas. Slum communities are people who live in uninhabitable areas such as along rivers or railroad tracks with house building components that don't meet healthy housing standards due to low income that cannot afford to buy land and fulfill the components of a livable house. This research uses a qualitative approach. The data in the study came from interviews conducted by five resource persons, namely the recipients of direct cash transfer. This research also gave five questions to five recipients of cash social assistance in the slum area of Medan's Deli River related to the effectiveness of the distribution of direct cash transfer funds. Through the questions that have been presented and asked to the target parties, the result of this study can be seen that the effectiveness of the distribution of direct cash transfer funds to slum communities in the Deli River Medan has not run optimally and effectively. This is because there is still an uneven distribution of assistance, long distribution, and difficult administrative arrangements related to DTKS data.

Keywords: Effectiveness, Direct Cash Transfer, Slum Communities

Pendahuluan

Kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan timbul sebagai salah satu dampak kurangnya ketersediaan pemukiman di daerah perkotaan dikarenakan keterbatasan lahan yang tak mumpuni arus urbanisasi yang masuk. Hal ini bertolak belakang dengan amanat UUD yang termaktub dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan hal itu, tempat tinggal yang layak huni serta lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang seharusnya dapat dipenuhi oleh negara sebagai kewajibannya dalam pemenuhan hak rakyatnya (Indra, 2024).

Kawasan permukiman kumuh juga seringkali diberi *label* dengan penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena kondisi rumah dan fasilitas rumah yang mereka miliki jauh dari standar layak. Dimana kondisi-kondisi tersebut dapat dicirikan lewat bangunan yang secara kasat mata dapat dilihat sangat kumuh dengan komponen-komponen bangunan yang tidak tersedia, seperti ventilasi udara, dan bahan bangunan yang tak cukup layak dijadikan rumah (Kruger, 2019). Ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung bagi sanitasi, seperti pinggiran sungai dan rel kereta api.

Dengan kondisi yang tidak layak serta serba keterbatasan tersebut, masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai masyarakat rentan, baik dari sisi ekonomi maupun social (Pandensingka, 2023). Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi dengan peran yang sangat besar akan kesejahteraan masyarakatnya mengeluarkan berbagai bentuk program bantuan guna membantu masyarakat rentan dan miskin, termasuk masyarakat kawasan permukiman kumuh, salah satunya adalah program bantuan langsung tunai (BLT).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang diluncurkan sebagai jaring pengaman sosial dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya program bantuan langsung tunai ini, pemerintah berharap agar semestinya dapat mendorong keberhasilan program-program bantuan lain seperti PKH maupun prakerja serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin, termasuk masyarakat permukiman kumuh (Sumantri, 2019).

Sungai Deli yang berada di daerah Kota Medan menjadi salah satu sungai yang dijadikan masyarakat rentan sebagai kawasan kumuh. Masyarakat rentan dengan perekonomian rendah terpaksa memilih hidup dengan membangun pemukiman atau tempat tinggal di daerah yang tak sepatasnya menjadi tempat hunian dikarenakan kondisi keuangan yang terbatas dengan realita harga rumah dan kontrakan yang tak masuk akal. Melihat kondisi tersebut, masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Deli Kota Medan sudah seharusnya dapat dijamin oleh pemerintah akan hak-hak dasar yang semestinya terpenuhi, salah satunya program-program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, sayangnya berdasarkan informasi yang didapat dari warga sekitar permukiman kumuh yang ada di aliran Sungai Deli Medan, mereka sering kali terlewat dan jarang mendapat akan hal-hal yang semestinya menjadi hak mereka, mulai dari program BLT, ataupun program bantuan lain. Hal ini kerap mereka

sampaikan pada lurah setempat, namun tak kunjung mendapat respon yang tepat dikarenakan mereka bukanlah masyarakat yang legal akan wilayah yang mereka tempati (Frame, 2018).

Menurut (Dunn, 2017) efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Menurut (Oktavia et al., n.d. 2020) ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh aliran Sungai Deli Kota Medan (Nawawi, 2019).

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam penyaluran program Bantuan Tunai Langsung (BLT), supaya program ini berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas (Iping, 2020). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepatnya di Aliran Sungai Deli Medan. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Pemukiman Kumuh di Aliran Sungai Deli Medan” (Sinaga, 2020).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas penyaluran dana bantuan langsung tunai pada masyarakat pemukiman kumuh di aliran sungai deli Medan, dengan indikator: Ketepatan Waktu, Ketepatan dalam menentukan pilihan dan Ketepatan Sasaran. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data inti dan data penunjang (Neale, 2024). Sumber data terdiri dari hasil wawancara pengamatan dari beberapa warga yang berguna untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan cara tanya jawab antara peneliti dan subjek yang diteliti, observasi ke lapangan dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu guna untuk memahami perilaku kelompok maupun individu, dan terakhir yaitu dokumen serta arsip untuk pertinggal penulis. Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat urbanisasi terutama mereka yang berasal dari luar kota, pemerintah daerah atau instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif (non-statistik). Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak. Setelah data tersebut dikelompokkan, penulis mengajarkannya dalam bentuk tulisan agar mudah untuk dipahami (Li, 2024). Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada Daerah Pinggiran Sungai Deli terdapat banyak rumah warga yang dibangun dipinggiran sungainya. Banyak rumah yang terlihat masih kurang layak untuk ditempati, permukiman ini dibangun oleh orang-orang yang mempunyai perekonomian yang masih rendah atau miskin. Permukiman ini berasal dari orang-orang yang berasal dari daerah luar kota Medan (Priyatiningsih, 2019). Orang-orang ini dinamakan dengan Masyarakat Urbanisasi yaitu Masyarakat yang melakukan perpindahan tempat tinggal yang awalnya dari desa ke perkotaan dengan harapan dapat merubah kehidupannya agar dapat lebih sejahtera dari segi Perekonomian maupun Pendidikan. Ekspektasi tersebutlah yang membuat mereka tidak memikirkan kemungkinan lain dan mempersiapkan diri untuk mengasah skill dan keterampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu banyak orang yang melakukan urbanisasi malah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan menyebabkan perekonomian mereka tetap tidak memiliki perubahan walaupun sudah berpindah ke kota (Linke, 2021).

Setelah melakukan perpindahan dari tempat asal ke kota Medan hal yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang ini pasti mencari tempat tinggal dan mencari pekerjaan, namun karena tidak didukung oleh skill dan keterampilan membuat mereka mengalami kesusahan untuk bersaing mencari pekerjaan yang bagus dan layak. Oleh sebab itu secara otomatis orang-orang ini mencari tempat tinggal yang lebih murah apalagi melihat harga tanah di kota Medan yang sangat mahal sehingga mereka mencari tempat tinggal disesuaikan lagi dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Tempat mereka buat menjadi permukiman tersebut adalah daerah yang dimiliki pemerintah salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai Deli ini ada juga yang memiliki alasan karena keluarganya yang sudah lebih dahulu tinggal di sekitaran Sungai Deli (Nie, 2022).

Menempati daerah di Pinggiran Sungai Deli ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah hal itu dikarenakan dapat membuat tidak berfungsinya pinggiran Sungai Deli secara normal sebagai Kawasan hijau. Larangan ini sudah diinformasikan dengan berbagai macam prasasti yang dikeluarkan oleh Dinas PU, Walaupun seperti itu masih saja terdapat beberapa oknum yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seperti; mereka memperjual belikan lahannya tanahnya kepada masyarakat urban (Winarso, 2019). Mereka yang melakukan itu juga tau bahwasannya membangun rumah disana sangat tidak diperbolehkan, tetapi karena mereka tidak punya ekonomi yang memumpuni jadi mereka membeli lahan punya pemerintah tersebut. Pertumbuhan permukiman kumuh yang berada di pinggiran Sungai Membuat makin meluasnya pemukiman kumuh tersebut.

Masyarakat sekitar pinggiran Sungai Deli memanfaatkan lingkungan tempat tinggal mereka tersebut adalah untuk membuat system mata pencaharian, terdapat warung kopi ataupun warung makan di sekitar perumahan mereka. Karena tidak berstruktur dalam mendirikan bangunan perumahan membuat permukiman tersebut semakin terlihat kumuh.

Sungai sebagai tempat sumber kehidupan, tetapi pada daerah Bantaran Sungai Deli di Kota Medan malah menjadi tempat prmbuangan sampah dari warga sekitar maupun warga luar yang membuang sampah ke arah sungai, bukan hanya itu limbah dan kotoran manusia juga di buang kearah sungai. Sungguh sangat disayangkan dan memprihatinkan melihat masyarakat yang tidak menggunakan mandi, tetapi malah menjadikannya tempat pembuangan (Supardi, 2021). Jika tidak disalahgunakan anak-anak juga mendapatkan kesenangan karna dapat bermain di area sungai, sangat disayangkan ketika warga sekitar sungai Deli tidak mampu merawat daerah yang mereka tinggalkan dan ditambah lagi pemerintah kurang tegas dalam mengatasi masalah ini apalagi ada beberapa perusahaan yang membuang limbah mereka ke arah sungai Deli.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan pinggiran Sungai Deli ini adalah bisa melalui kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang mempunyai cara yaitu dengan menyediakan dan menyiapkan masa depan anak mereka dengan memberikan dan menyediakan dana Pendidikan untuk masing-masing anak karena mereka yang sudah sadar bahwa Pendidikan tinggi itu merupakan pilar utama yang dapat dilakukan supaya dapat pekerjaan yang lebih layak lagi sehingga generasi berikutnya tidak lagi harus mendirikan rumah di bantaran Sungai deli yang sewaktu-waktu bisa saja digusur oleh pemerintah dan ketika hal itu terjadi maka pemerintah harus sudah menyediakan jalan keluar bagi Masyarakat yang digusur . Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah karena sampai sekarangpun kondisi daerah Pinggiran Sungai Deli itu masih sama dan bahkan semakin bertumbuh banyak perumahan warga.

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial merupakan sebuah bantuan yang memiliki sifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah agar bisa meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program yang diupayakan pemerintah guna membantu masyarakat yang kurang mampu pada kawasan pinggiran Sungai Deli, program ini berbentuk bantuan sosial tunai maupun sembako. Akan tetapi setelah dilakukan wawancara pada salah satu warga ibu rumah tangga ia mengatakan bahwasannya bantuan sosial yang diberlakukan masih belum mendapatkannya, ia juga hanya menerima bantuan hanya beberapa kali saja dan setelahnya itu tidak mendapatkannya sampai saat ini. Bukan hanya salah satu ibu rumah tangga ini saja tetapi banyak warga sekitaran pinggiran Sungai Deli yang tidak dapat merasakan program bantuan sosial. Padahal bisa dikatakan mereka ini tinggal di pusat kota yang diapit dengan gedung-gedung tinggi seperti; Mall Deli Park Medan, J.W Marriot, Serta berdekatan dengan kantor walikota Medan, tapi agak aneh jika mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang dimana bantuan ini pasti bisa dipergunakan untuk kebutuhan keseharian mereka.

Efektivitas Bantuan Sosial Tuna Di Pinggiran Sungai Deli. Dilihat dari teori efektivitas, menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Adapun menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat

dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang meliputi tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pemantauan program.

Fokus penelitian ini juga mengukur efektivitas pada pelaksanaan bantuan sosial di Kawasan Pinggiran Sungai Deli. Untuk mengukur seberapa efektivitas dalam program yang dilakukan bisa dilakukan dengan beberapa langkah menurut Budiani (2007:53), yaitu sebagai berikut: 1) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 2) Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran peserta program pada khususnya. 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta.

Warga pinggiran Sungai Deli yang tidak dapat merasakan program bantuan sosial, maka dapat menimbulkan implikasi serius pada pemerintah. Implikasi juga dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya dan berdampak pada tingkat kepuasan warga, tetapi dapat berujung kosekuensi politik dan hukum;

1. *Adanya Penurunan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah*

Implikasi ini bisa juga disebut utama dikarenakan kepercayaan publik menjadi terkikis yang menjadi kegagalan dalam mendistribusikan bantuan sosial yang tepat sasaran serta tidak meratanya program bantuan sosial kepada warga miskin.

2. *Dampak Politik*

Kegagalan dalam program bantuan sosial dapat menurunkan popularitas pemerintah dan partai politik yang sedang berkuasa, juga hambatan pada pilkada calon petahana mendapatkan tantangan yang berat.

3. *Kosekuensi Hukum.*

Jika adanya ketidakpatuhan dalam penyelewengan Undang-Undang terhadap peraturan dalam menyalurkan bantuan sosial, dan jajaran pemerintah dapat dikenakan sanksi hukuman.

4. *Kerugian Sosial*

Ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial dapat memperluas kesenjangan sosial, masyarakat menjadi terpecah antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Hal ini menjadi sulit untuk kemajuan di Kota Medan karena masyarakat yang tidak mampu mendapatkan efektivitas dari program yang dijalankan tersebut. Kaum proletar seperti ini menjadi sulit untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan kemampuan bantuan sosial ini akan menjadi ancaman kepada mereka karena semakin memburuk keadaan kondisi ekonomi mereka.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi permukiman di pinggiran Sungai Deli Medan, masih jauh dari layak huni, dengan banyak rumah yang dibangun oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat urbanisasi yang berpindah dari daerah luar kota dengan harapan perbaikan ekonomi seringkali menghadapi kenyataan pahit, di mana keterbatasan keterampilan dan pendidikan menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terpaksa memilih tempat tinggal di kawasan yang tidak seharusnya dihuni, seperti bantaran sungai, meskipun terdapat larangan dari pemerintah.

Adapun program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak warga yang tidak menerima bantuan secara merata, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implikasi dari ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik serta hukum.

Dari analisis efektivitas program bantuan sosial, ditemukan bahwa kriteria yang digunakan meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan belum terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin di pinggiran Sungai Deli. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi secara adil.

Daftar Pustaka

- Agrio Scivo Kowaas, dkk. (2017). Efektivitas pelaksanaan tomohon internasional flower festival di kota tomohon. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 6-7.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 874-885.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran.
- Evi Nainah, dkk. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan sosial tunai di kota bandung. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 6(1)), 1283.
- Frame, D. (2018). Innovation in regulated electricity distribution networks: A review of the effectiveness of Great Britain's Low Carbon Networks Fund. *Energy Policy*, 118, 121–132. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.033>
- Indra, R. (2024). Towards Indonesia's Future: Embracing Mobile Money Distribution with the Technology Acceptance Model Approach. *Journal of Distribution Science*, 22(7), 43–51. <https://doi.org/10.15722/jds.22.07.2024.07.43>

- Kruger, L. G. (2019). Assistance to firefighters program: Distribution of fire grant funding (updated). *Firefighter Assistance Grants and Funding*, 93–120. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85077672460&origin=inward>
- Li, Z. (2024). Qualitative analysis and optical solitons for the (1+1)-dimensional Biswas-Milovic equation with parabolic law and nonlocal nonlinearity. *Results in Physics*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.107304>
- Linke, B. (2021). Fund transfers to authorities owning a company as state aid?-equal fund-distribution in the case of 'double roles.' *European State Aid Law Quarterly*, 20(1), 114–119. <https://doi.org/10.21552/estal/2021/1/13>
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi
- Nawawi, A. (2019). The effectiveness of public school fund distribution – A study of poor student trust fund. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(2), 877–897. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85069173985&origin=inward>
- Neale, B. (2024). Qualitative Longitudinal Research: Research Methods. *Qualitative Longitudinal Research: Research Methods*, 1–164. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85202421929&origin=inward>
- Nie, J. (2022). Distribution of Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act Provider Relief Fund Assistance to Urology Practices. *Journal of Urology*, 207(1), 7–8. <https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002255>
- Pandesingka, E. F. (2023). Decision support system for Bantuan Langsung Tunai (BLT) recipients using fuzzy inference system. *AIP Conference Proceedings*, 2694. <https://doi.org/10.1063/5.0137170>
- Priyatiningsih, N. (2019). The Effect of Utilizing Health Operational Assistance Funds on Children's Health Efforts Through on Integrated Health Center (IHC) in Indonesia Based on 2014 IFLS Data. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(3), 311–317. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v15i3.6286>
- Sinaga, J. S. (2020). The effect of BI rate, exchange rate, inflation and third party fund (DPK) on credit distribution and its impact on non performing loan (NPL) on XYZ commercial segment bank. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 8(3), 55–64. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080301>
- Sumantri, R. (2019). The effectiveness of distribution of zakat funds on ZDC South Sumatra. *Opcion*, 35, 1572–1588. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85073576061&origin=inward>
- Supardi. (2021). Correlation Between Third Party Funds, Inflation, and Interest Credit Rate Toward Credit Distribution and Investment in Indonesian Bank. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 697–704. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.86>

- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.
- Winarso, E. (2019). The influence of third party funds and credit distribution to non-performing loan (NPL) (Empirical study on conventional banking listed on Indonesia stock exchange period 2013-2016). *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(3), 31-48.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85078789144&origin=inward>